

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Permukiman

Dalam UU RI Nomor 1 tahun 2011 Kawasan Permukiman pada BAB 1 Pasal 1, disebutkan bahwa permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai sarana-prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Menurut Doxiadis (1977) permukiman terdiri atas lima unsur utama yaitu alam (*nature*), manusia (*antropos*), masyarakat (*society*), ruang kehidupan (*shell*), serta jaringan (*network*). Chiara dalam Sari (2017) mengemukakan bahwa terdapat beberapa jenis pelayanan yang harus ada dalam permukiman sebagai penyedia pelayanan, di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan perekonomian.

Seiring berjalannya waktu, permukiman dapat mengalami suatu perkembangan secara signifikan. Arti kata perkembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mekar, membentang, atau bertambah besar (luas/ banyak/ lain sebagainya). Perkembangan permukiman merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari perkembangan suatu kota. Hal tersebut terjadi akibat dari pertumbuhan penduduk, keadaan ekonomi masyarakat, serta bertambahnya kegiatan masyarakat yang menuntut bertambahnya area permukiman yang dibutuhkan. Perkembangan suatu permukiman dapat dilihat dari pola-pola permukiman yang terbentuk. Bintarto (1977) mengemukakan pola perkembangan

permukiman yang terbentuk berdasarkan pada karakteristik kehidupan masyarakat, potensi sumberdaya (kesempatan kerja) yang tersedia, kondisi fisik alami serta fasilitas kota terutama yang berkaitan dengan transportasi dan komunikasi.

Faktor pendorong utama perkembangan permukiman menurut Ilhami (1990) adalah pertumbuhan penduduk, keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan penambahan kegiatan masyarakat. Sujarto (1985) mengemukakan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan permukiman adalah perkembangan penduduk, adanya kegiatan fungsional yang berkembang, terdapat kegiatan perekonomian, terdapat kegiatan kerja. Permukiman dengan kegiatan-kegiatan fungsional yang termasuk di dalamnya mempunyai aksesibilitas maksimum (Camm dan Irwin, dalam Amila 1996). Menurut Yunus (1987) faktor alam, lokasi, aksesibilitas, dan transportasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman.

Perkembangan permukiman sebagai suatu fenomena geosfer, dianalisis formulasi keterkaitannya dapat berbentuk *space based analysis*, *time based analysis*, maupun *time space based analysis* (Yunus, 2000: 23). Di dalam *space based analysis*, suatu fenomena dianalisis berdasarkan perbedaan ruangnya dalam waktu yang sama, *time based analysis* adalah menganalisis suatu fenomena geosfer pada ruang yang sama dalam waktu yang berbeda, sedangkan *time space based analysis* adalah suatu fenomena geosfer yang dianalisis berdasarkan perbedaan ruang dan waktunya.

B. Kota

Kota merupakan lingkup kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Dilihat dari segi fisik, kota selalu berkembang, baik melalui perkembangan wilayah perkotaan maupun pemekaran kota. Wilayah perkotaan adalah suatu kota dengan wilayah dan berbagai pengaruhnya, seperti hubungan ketergantungan antar suatu wilayah perkotaan dengan kota-kota kecil atau desa-desa dan sebaliknya. Wilayah kota secara administratif berada di wilayah yang dibatasi oleh batas administratif yang berdasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku (Bintarto, 1979:36).

Dari segi fisik, kota di definisikan sebagai suatu satuan permukiman yang mempunyai bangunan-bangunan perumahan yang berjarak relatif padat dan yang mempunyai sarana-prasarana serta fasilitas-fasilitas yang relatif memadai guna memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Rumusan ini terlepas dari besarnya jumlah penduduk, tetapi lebih dilihat pada sisi fisiknya, yaitu gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang letaknya berdekatan, dan memiliki sarana dan prasarana umum seperti jalanan, air dan penerangan, sarana ibadah, pemerintahan, rekreasi dan olah raga, ekonomi, komunikasi, serta lembaga- lembaga yang mengatur kehidupan bersama penduduknya.

Dari segi jumlah penduduk, kota didefinisikan berdasarkan kesepakatan mengenai jumlah minimum populasi yang dapat digunakan untuk mengualifikasikan permukiman sebagai suatu kota. Karena sulit mencapai kesepakatan, kota dapat dilihat pada cirinya, yaitu:

- a. Peranan besar yang dipegang oleh sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) dalam kehidupan ekonomi;
- b. Jumlah penduduk yang relatif besar;
- c. Heterogenitas susunan penduduknya;
- d. Kepadatan penduduk yang relatif besar.

Dari sudut demografis, kota dirumuskan sebagai pengelompokan orang atau penduduk dalam ukuran jumlah tertentu, dan wilayah tertentu. Karena itu, sebagai suatu prosedur yang umum, kota (urban) adalah tempat permukiman yang mempunyai jumlah penduduk besar. Dalam proses perkembangan kota pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan. Perkembangan itu sendiri merupakan proses perubahan keadaan dari keadaan satu ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda. Perkembangan dan pertumbuhan kota berjalan sangat dinamis.

Menurut Branch (1995:37), beberapa unsur yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota yaitu sebagai berikut :

- a. Kondisi geografis, yaitu pengaruh letak geografis terhadap perkembangan fisik dan fungsi yang diemban oleh kota. Contohnya adalah kota pantai, yaitu akan berkembang secara fisik pada bagian daratan yang berbatasan dengan laut dengan perkembangan awal yang berada di sekitar area pelabuhan. Oleh karena itu, kota memiliki fungsi sebagai kota perdagangan dan jasa serta sebagai jaringan distribusi jalur transportasi pergerakan baik manusia maupun barang.
- b. Tapak (site), merujuk pada topografi suatu wilayah. Wilayah kota akan berkembang dengan memperhatikan dan memperhitungkan kondisi kontur

- bumi. Dengan demikian, pembangunan sarana dan prasarana kota akan menyesuaikan dengan topografinya agar dapat berkembang secara maksimal.
- c. Fungsi yang diemban kota, yaitu aktivitas utama paling menonjol yang dijalankan oleh sebuah kota. Kota yang memiliki banyak fungsi, seperti fungsi ekonomi dan kebudayaan, akan lebih cepat perkembangannya daripada kota berfungsi tunggal.
 - d. Sejarah dan kebudayaan, merupakan hal yang melatarbelakangi terbentuknya kota dan juga berpengaruh terhadap perkembangan kota karena sejarah dan kebudayaan mempengaruhi karakter fisik dan masyarakat dari sebuah kota.
 - e. Unsur-unsur umum, yaitu unsur-unsur yang juga turut mempengaruhi perkembangan kota seperti bentuk pemerintahan, organisasi administratif, jaringan transportasi, energi, pelayanan sosial dan berbagai pelayanan lainnya.

Semua unsur tersebut menjadi sebuah sistem yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam tampilan fisik yang terwujud dari bentukan fisik perkotaan yang mengemban fungsi-fungsi tertentu.

C. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu sarana dan prasarana yang cukup penting dalam sebuah perencanaan suatu kawasan. Dalam hal ini bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap elemen masyarakat, sehingga perlunya mementingkan kebutuhan luas lahan akan sarana pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu

pendidikan, serta relevansi dan efisiensi dalam manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan yang sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan kualitas pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) disebutkan bahwa pengembangan fasilitas pendidikan diprioritaskan menyebar mengikuti persebaran daerah permukiman. Lokasi sarana pendidikan diharapkan berada dalam jarak yang optimum terhadap kawasan penduduk atau daerah permukiman, supaya pelajar tidak memerlukan jarak perjalanan yang jauh untuk menjangkau sarana pendidikan.

Menurut Standard Nasional Indonesia/SNI, dasar dari penyediaan fasilitas pendidikan yaitu dapat melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang formal (kelurahan dan kecamatan) maupun yang informal (RT dan RW) dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh fasilitas pendidikan. Selain itu, dasar penyediaan fasilitas pendidikan juga mempertimbangkan pendekatan keruangan dengan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada serta jangkauan radius area layanan yang terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus terpenuhi untuk melayani area tertentu.

D. Sistem Informasi Geografis

Teknologi canggih saat ini telah merambah hampir seluruh sisi kehidupan manusia. Berbagai aspek keilmuan telah memanfaatkan teknologi ini untuk mengembangkan berbagai teori dan aplikasinya melalui bermacam-macam sistem informasi. Salah satu jenis sistem informasi yang saat ini populer, khususnya dalam

bidang survei pemetaan adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah baik negeri maupun swasta untuk keperluan perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi hasil pembangunan suatu wilayah. SIG menjadi alat yang sangat berguna bagi para peneliti, pengelola, pengambil keputusan untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan, menentukan pilihan atau membuat kebijakan keruangan melalui metode analisis data peta dengan memanfaatkan teknologi canggih komputer.

Perkembangan pemanfaatan data spasial belakangan ini terus meningkat secara drastis. Hal ini berkaitan dengan semakin meluasnya pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan perkembangan teknologi dalam memperoleh, merekam, dan mengumpulkan data yang bersifat keruangan (spasial). Sistem informasi atau data yang berbasis keruangan pada saat ini merupakan salah satu objek elemen yang sangat penting, hal ini karena berfungsi sebagai pondasi dalam melaksanakan dan mendukung berbagai macam aplikasi. Sebagai contoh aplikasi yang dapat dibuat dengan dasar SIG adalah melakukan pemetaan perkembangan wilayah permukiman dan pemetaan persebaran layanan fasilitas pendidikan.

Dengan menggunakan sistem informasi geografis, informasi yang ada dapat diasosiasikan pada sebuah struktur informasi yang berbasis pemetaan secara geografis, sehingga sistem informasi geografis akan memberikan peran yang besar dalam membantu mengorganisasikan informasi-informasi yang diinginkan dan akan diperoleh lebih banyak lagi informasi yang didapatkan.

E. Buffering

Buffer adalah analisa yang akan menghasilkan unsur-unsur spasial yang

berupa polygon, membuat peta dengan jarak tertentu dari suatu objek. Unsur-unsur ini merupakan area atau buffer yang berjarak (yang ditentukan) dari unsur-unsur spasial yang menjadi masukannya. *Multiple ring buffer* memiliki fungsi untuk membuat lebih dari satu *buffer* dengan jarak interval tertentu dari suatu objek yang akan diteliti, misalnya jarak pertama 5 m, jarak kedua 10 m, jarak ketiga 15 m. Dengan adanya analisa *buffer* maka akan dapat menghasilkan layer spasial baru yang berbentuk polygon dengan ketentuan jarak dari unsur-unsur yang menjadi masukannya (Prahasta, 2009).

Pembuatan *buffer* seringkali dikaitkan pada analisis jarak atau zona tertentu. *Buffer* secara lebih jauh difungsikan mencari kaitan dari elemen-elemen spasial yang bersangkutan. *Buffer* yang dibuat akan membentuk range area berupa polygon yang merupakan zona wilayah baru yang akan menutupi objek spasial lain pada skala jarak tertentu (ESRI, 2009). Pembuatan *buffer* bisa dilakukan pada objek atau *feature* berupa *point*, *polyline* ataupun *polygon*.

Buffer merupakan bentuk lain dari teknik analisis yang mengidentifikasi hubungan antara suatu titik dengan area disekitarnya atau disebut sebagai *Proximity Analysis* (analisis faktor kedekatan). *Proximity Analysis* merupakan proses analisa yang biasa digunakan dalam penentuan site/lahan untuk keperluan strategi (Aqli, 2010).

Hasil *buffer* jangkauan layanan fasilitas Pendidikan dalam menganalisa faktor eksternal (sekolah yang terkena dampak radius layanan sekolah terhadap permukiman di kelurahan lain). Faktor eksternal yang dimaksud adalah besaran ketrimaan pelayanan sekolah dari luar, sehingga keterjangkauan yang dimaksud

adalah melihat permukiman di tiap kelurahan yang terjangkau oleh sekolah-sekolah yang ada di sebuah wilayah. Sehingga dapat dikatakan permukiman warga yang berada di dalam jangkauan pelayanan buffer tersebut merupakan daerah yang sudah terlayani fasilitas pendidikan.

Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 metode yang dilakukan yaitu untuk mengetahui jarak tempuh yang ideal dengan menggunakan standar radius pelayanan sarana pendidikan, dengan pencapaian untuk SD 3 km, SMP 6 km, dan SMA 6 km.

F. Landasan Teori

Landasan teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai sarana-prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 Kawasan Permukiman pada BAB 1 Pasal 1). Faktor pendorong utama perkembangan permukiman menurut Ilhami (1990) adalah pertumbuhan penduduk, keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan penambahan kegiatan masyarakat.
2. Kota merupakan lingkup kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Secara fisik, kota selalu berkembang, baik melalui perembesan wilayah perkotaan maupun pemekaran kota.
3. Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) disebutkan bahwa

pengembangan fasilitas pendidikan diprioritaskan menyebar mengikuti persebaran daerah permukiman. Lokasi sarana pendidikan diharapkan berada dalam jarak yang optimum terhadap kawasan penduduk atau daerah permukiman, supaya pelajar tidak memerlukan jarak perjalanan yang jauh untuk menjangkau sarana pendidikan.

4. Sistem Informasi Geografis (SIG) yaitu sistem informasi yang secara khusus mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Sebagai contoh aplikasi yang dapat dibuat dengan dasar SIG adalah pemetaan perkembangan wilayah permukiman dan pemetaan persebaran layanan fasilitas pendidikan.
5. Buffer merupakan bentuk lain dari teknik analisis yang mengidentifikasi hubungan antara suatu titik dengan area disekitarnya atau disebut sebagai Proximity Analysis (analisis faktor kedekatan). Proximity Analysis merupakan proses analisa yang biasa digunakan dalam penentuan site/lahan untuk keperluan strategi (Aqli, 2010).

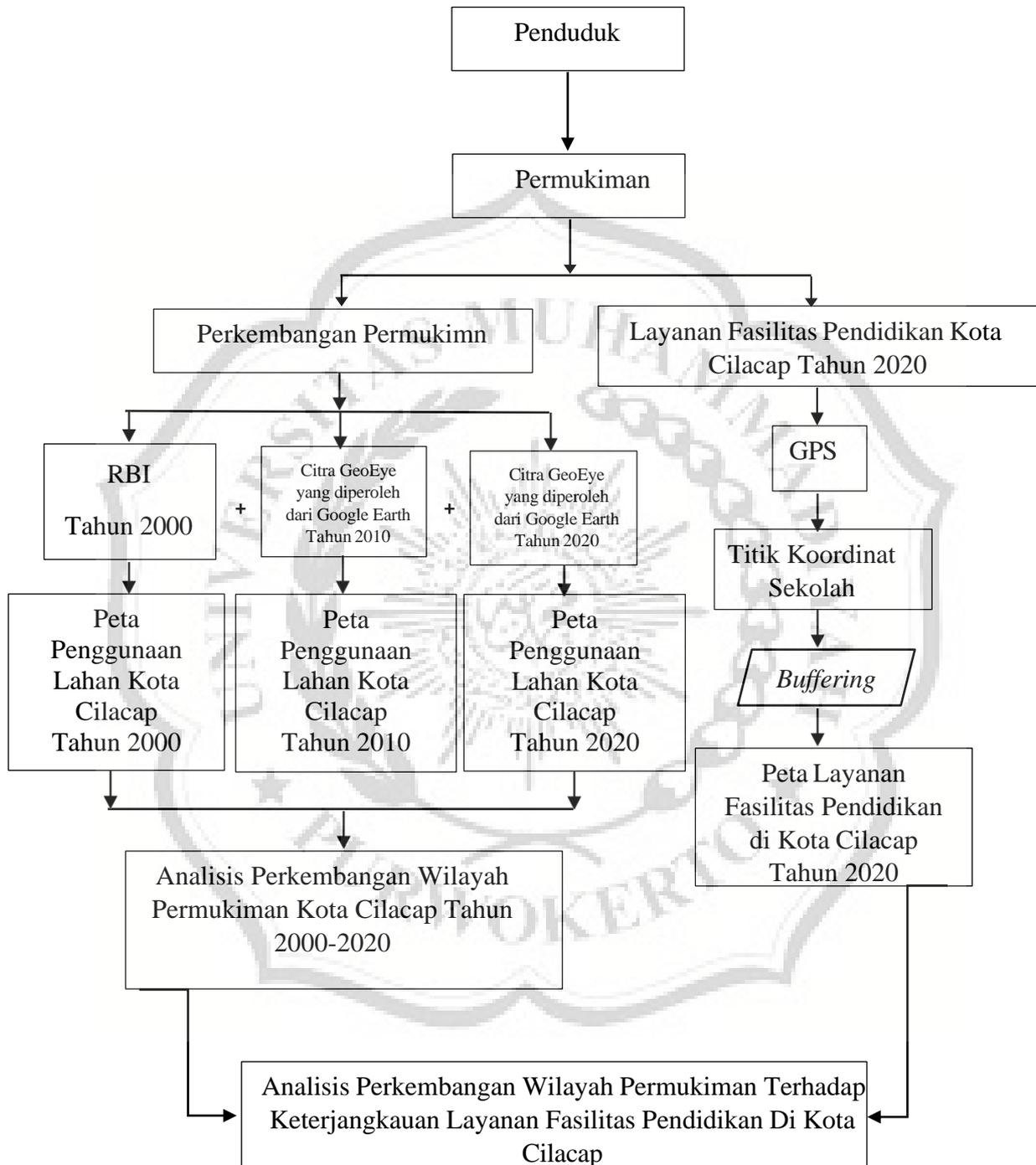
G. Penelitian Relevan

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

No	Penulis dan Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Youngki Ari Wibowo (2015). Judul “Analisis Keterjangkauan Lokasi SMP Negeri Terhadap Sebaran Permukiman Di Kabupaten Pati”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui keterjangkauan lokasi SMP Negeri terhadap lokasi permukiman di Kabupaten Pati. 2. Mengetahui kondisi pelayanan fasilitas Pendidikan SMP Negeri eksisting berkaitan dengan penduduk usia SMP (13 - 15 tahun) di Kabupaten Pati. 	<p>Metode penelitian ini menggunakan analisis deksriptif dan analisis keruangan.</p> <p>Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis distribusi frekuensi jumlah maupun luasan, sedangkan analisis keruangan digunakan untuk mengidentifikasi jangkauan pelayanan SMP Negeri di Kabupaten Pati.</p>	Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran dihasilkan yaitu perlu adanya penambahan SMP Negeri baru di Kecamatan Cluwak untuk meningkatkan sarana fasilitas Pendidikan yang kurang memadai di wilayah tersebut.
2	Windi Sugiyanto (2021). Judul “Analisis Perkembangan Wilayah Kota Surakarta Antara Tahun 2008 Dan Tahun 2017”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui perubahan perkembangan wilayah Kota Surakarta pada tahun 2008 dan 2017. 2. Mengetahui variasi perkembangan wilayah tahun 2008 dan 2017 di Kota Surakarta. 	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari instansi terkait yaitu BPS Kota Surakarta.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variasi tingkat perkembangan wilayah Kota Surakarta antara tahun 2008 dan 2017 dibagi menjadi tiga tingkatan kelas, yaitu tingkat perkembangan menurun, tetap, dan meningkat.
3	Dian Ayu Saraswati, Sawitri Subiyanto, dan Arwan Putra Wijaya (2016). Judul	Untuk mengetahui perubahan luas dan pola persebaran permukiman di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik,	Metode dalam penelitian ini adalah teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dengan	Hasil analisis menunjukkan perubahan luas lahan permukiman di Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Gunungpati dan

	“Analisis Perubahan Luas dan Pola Persebaran Permukiman”.	Kecamatan Gunungpati, dan Kecamatan Mijen Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.	interpretasi penggunaan lahan paada peta RBI tahun 1992 dan Citra SPOT 6 tahun 2014 yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tetangga terdekat untuk mengetahui pola persebaran permukiman.	Mijen pada tahun 1992 sampai tahun 2014 mengalami perubahan sebesar 1.466,837 Ha, sedangkan lahan non permukiman mengalami perubahan sebesar 2.617,194 Ha. Pola persebaran acak mengalami perubahan sebesar 167,1764 Ha, sedangkan pola persebaran mengelompok mengalami perubahan sebesar 1.326,2547 Ha.
4	Amara Auliafani (2022). Judul “Analisis Perkembangan Wilayah Permukiman Terhadap Keterjangkauan Layanan Fasilitas Pendidikan Di Kota Cilacap”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui perkembangan wilayah permukiman di Kota Cilacap tahun 2000, 2010 dan 2020. 2. Mengetahui keterjangkauan wilayah permukiman terhadap layanan fasilitas pendidikan 	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis geospasial guna mengetahui perkembangan permukiman dan keterjangkauannya terhadap layanan fasilitas pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan wilayah permukiman di Kota Cilacap dari tahun 2000, 2010 dan 2020 sebesar 409,21 Ha atau 4,67% 2. Keterjangkauan permukiman terhadap layanan fasilitas pendidikan SD sebesar 99,04% terlayani dan 0.6% tidak terlayani, Sekolah Menengah Pertama sebesar 100% terlayani, dan SMA sebesar 96,69% terlayani dan 3,31 % tidak terlayani.

H. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir